ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENERAPAN PASAL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN STUDI KOMPARATIF
(PUTUSAN NOMOR 1173/PID.SUS/2024/PN MEDAN), (PUTUSAN NOMOR 1700/PID.SUS/PN MEDAN), DAN (PUTUSAN NOMOR 2185/PK/PID.SUS/2025)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana narkotika dalam hukum Indonesia, penerapan pasal dalam putusan perkara narkotika, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana narkotika bersifat dualistis, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 sebagai lex generalis. Dalam praktiknya, hakim cenderung menerapkan pasal yang bersifat represif, seperti Pasal 114 dan Pasal 112, dengan menitikberatkan pada aspek kepemilikan dan peredaran, meskipun terdapat indikasi bahwa terdakwa merupakan penyalahguna. Selain itu, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai peran dan tingkat keterlibatan terdakwa.

Perbedaan tersebut menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara narkotika. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, termasuk mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Kata kunci: tindak pidana narkotika, pertimbangan hakim, disparitas pemidanaan, penerapan pasal, kepastian hukum.

A LEGAL ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS AND THE APPLICATION OF STATUTES IN NARCOTICS CRIMES BASED ON A COMPARATIVE STUDY

(JUDGMENT NO. 1173/PID.SUS/2024/PN MEDAN),

(JUDGMENT NO. 1700/PID.SUS/PN MEDAN), AND

(JUDGMENT NO. 2185/PK/PID.SUS/2025)

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of narcotics-related criminal offenses in Indonesian law, the application of legal provisions in narcotics case rulings, and the considerations of judges in rendering their decisions. The methodology employed is a normative legal approach, utilizing both a statutory analysis and a case-based analysis through the examination of three court rulings.

The results of the study indicate that the regulation of narcotics-related criminal offenses is dualistic in nature, being governed by Law No. 35 of 2009 as lex specialis and the 2023 Criminal Code as lex generalis. In practice, judges tend to apply repressive provisions, such as Articles 114 and 112, focusing on aspects of possession and distribution, even when there are indications that the defendant is a drug user. Additionally, there are differences in judges' considerations when assessing the defendant's role and level of involvement.

These differences lead to sentencing disparities in narcotics cases. Therefore, clearer guidelines are needed for judges to achieve substantive justice, including considering a rehabilitation approach for drug abusers.

Keywords: *narcotics offenses, judicial considerations, sentencing disparities, application of provisions, legal certainty.*